

TAFSIR KEADILAN SOSIAL DAN SEMANGAT GENDER

Surahman Amin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

E-mail: surahman.amin@gmail.com

Abstrak

Artikel ini diawali dengan penjelasan pengertian gender. Perbedaan istilah seks dan gender sangat mendasar yaitu seks lebih bersifat alamiah yang tidak dapat berubah sepanjang hidup, sedangkan gender mengambil peran dalam area sosial di masyarakat. Dalam hal gender, banyak persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, fenomena ketidakadilan gender, berkaitan erat dengan doktrin agama yang selama ini dipahami secara sempit oleh tokoh, dan sebagian besar masyarakat. Peneliti menggunakan studi pustaka untuk menjawab kegelisahan akademiknya seputar keadilan gender. Hasil penelitiannya disampaikan secara deskriptif analitis. Peneliti menemukan wacana gender semarak di dunia Barat, disebabkan karena perubahan pola sosial, terutama semenjak terjadinya revolusi industri. Sebuah perjuangan antar kelas (*class struggle*), yakni antara kaum perempuan sebagai sebuah kelompok sosial melawan kelompok sosial yang lainnya, yaitu kaum lelaki dengan tujuan untuk mencapai kesejajaran. Semangat gender ini sesungguhnya berkaitan dengan persoalan kemajuan perempuan dan tercapainya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui pemahaman gender maka dampak pembangunan terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki tidak akan berbeda, sebab ketimpangan status sosial bukan sekedar bersumber pada persoalan seks tetapi seluruh nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

Kata kunci: Gender, keadilan, perempuan, dan kemajuan.

Abstract

*This article begins with introducing meaning of gender. Distinction both term of sex and gender, sex is more unadorned which could not change for long away, while gender plays role in social area in society. In the line of gender, gender's problems profoundly close with daily life. For instance, injustice gender phenomenon deals with dogmas of religion which were understood narrowly by scholars and mostly the publics. The researcher uses literature review to answer his academic anxiety around justice of gender. The result of this paper is passed on by descriptive analysis. The writer finds gender discussion in western lively, it is caused since changging of social patterns particularly at beggining of revolusion industry. A struggle between classes (*class struggle*), that is women as a social group opposes other social groups, namely men*

are having a goal to achieve alignment. Spirit of gender deals indeed with women progress and achieving alignment between women and men. The conclusion of this study is by understanding gender, a crash emerges toward development of women and men live would not differ, since dispropotion of social status does not originate from the matter of sex, but cultural social value which exists in society also gives the contribution.

Keywords: gender, justice, women, and deveoptment.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984) Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dikenal dengan istilah CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah lama disahkan.¹ Meskipun CEDAW telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, persepsi masyarakat tentang perempuan dan perannya tampaknya masih menimbulkan perdebatan. Di era reformasi dan globalisasi ini, perempuan masih sering dicurigai dan dijadikan komoditas. Dalam buku *The Ethics of Ambiguity*, Simone de Beauvoir pernah mengatakan, bahwa etika yang selama ini berlaku dalam masyarakat pun terwujud dari nilai-nilai moral yang dideskripsikan oleh kaum laki laki sesuai selera dan kepentingan mereka. Perempuan selama ini lebih banyak didikte dan dipinggirkan oleh kekuasaan kultur patriarkal, termasuk di bidang moralitas.² Hal ini terjadi karena ketidakjelasan konsep mengenai gender.

Adanya fenomena dan perbedaan yang cukup menonjol seputar hubungan dan pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan dalam bidang sosial. Dimana laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.³ Dalam masyarakat agraris dengan wilayah yang subur peranan perempuan lebih mandiri, dan pola hubungan yang terbentuk dalam masyarakat industri lebih menghargai skill daripada jenis kelamin. Kondisi, dan struktur sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi pola hubungan antara laki-laki, dan perempuan, bahkan juga antara generasi tua, dan generasi mudanya. Demikian pula kompleksitas hubungan antara laki-laki, dan perempuan, misalnya, sejak dibangun Tajmahal di India. Dengan berbagai peperangan yang menelan jutaan jiwa kesemuanya itu tidak jarang bermula dari dinamika, gejolak, dan misteri

¹ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), h. v lihat juga: Mansour Fakih, dalam "Pengantar" Julian Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5.

² Andriana Venny, *Perempuan dan Tubuhnya* diakses melalui laman <http://www.yjp.or.id/yjp-upload> pada 20 Agustus 2015.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth.), h. 7

yang muncul dari kompleksitas relasi antara laki-laki, dan perempuan.⁴ Dari sini, kemudian banyak doktrin keagamaan (Islam) yang timpang gender, karena teks-teks keagamaan dipahami secara tekstual.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kajian gender dewasa ini, semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik lingkungan akademis maupun media massa. Persoalan bias gender sebenarnya persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi fenomena yang biasa bagi kebanyakan masyarakat. Terlebih lagi, fenomena ketidakadilan gender, berkaitan erat dengan doktrin agama yang selama ini dipahami secara sempit oleh tokoh, dan sebagian besar masyarakat. Sedangkan agama menjadi salah satu institusi sosial yang sangat menentukan seluruh perkembangan masyarakat, terutama untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Agama sebagai unsur pembentuk pengetahuan tentang relasi gender, seringkali bias pemahaman, dan dijadikan sumber legitimasi teologis tidak terbantahkan atas kenyataan yang menyudutkan kaum perempuan.⁵

Dalam satu dasawarsa terakhir, telah terjadi suatu proses perubahan paradigma setelah melalui perdebatan panjang tentang pemikiran gerakan feminisme, yakni antara pemikiran yang lebih memutuskan perhatian kepada masalah perempuan berhadapan dengan pemikiran feminisme yang lebih menitikberatkan perhatian terhadap sistem dan struktur masyarakat yang dilandaskan kepada analisis hubungan gender.⁶

Interpretasi gender yang diartikan sebagai kelemahan, yakni perempuan yang mempunyai sifat lemah lembut mengakibatkan perempuan itu harus menerima hanya untuk dijadikan sebagai "konco wingking" yang hanya bisa berperan dalam sektor domestik, dan jauh dari sektor publik.⁷ Kata gender telah memasuki perbendaharaan setiap diskusi, dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian halnya di Indonesia. Hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah memperbincangkan gender. Realitasnya, masih terjadi ketidakpuasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya

⁴ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 67.

⁵ Deny Hamdani, "Islam dan Wacana Gender", dalam *Jurnal Justisia*, Edisi 18, Juli 2000, h. 85

⁶ Mansour Fakih, dalam "Pengantar" Julian Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 2.

⁷ Siti Aminah, "Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an Pendekatan dengan Metode Tematik", dalam *Jurnal Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Walisongo*, Semarang, Edisi 17, Semarang, 2001, h. 30

dengan usaha emansipasi perempuan. Mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokrasi, karena dengan kesetaraan gender akan membuka peluang, serta akses bagi seluruh masyarakat Indonesia dari segala lapisan untuk ikut, serta melakukan proses demokratisasi itu sendiri.⁸

Diawali dengan ide, dan gagasan R.A. Kartini antara lain lewat buku *Habis Gelap Terbitlah Terang* perjuangan perempuan untuk persamaan hak sampai kini terus bergulir. Belakangan ini, wacana itu menjadi semakin marak. Dalam rentang waktu yang demikian panjang, perjuangan perempuan menuju persamaan hak itu belum menemukan hasil secara maksimal.⁹

Persamaan hak perempuan, paling tidak berangkat dari tiga kecenderungan yang telah ada, yakni: *pertama*, perempuan cenderung dilihat sebagai kapital dalam proses transformasi sosial ekonomi. *Kedua*, pembahasan atau penelitian yang cenderung dijiwai oleh suatu gugatan tentang absensi perempuan dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, hukum, dan industri. *Ketiga*, kaum perempuan cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Tulisan ini mencoba melihat semangat gender dalam perspektif keadilan sosial pada masyarakat Islam, khususnya realitas di Indonesia.

B. Perbedaan Seks dan Gender

Di setiap masyarakat, tuntutan akan sifat-sifat yang harus dimiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidaklah selalu sama. Berbagai faktor telah menentukan derajat perbedaan pembagian sifat-sifat antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan seks. Secara garis besar, gender merupakan satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹² Sedangkan Julia C. Mosse memberikan batasan mengenai pengertian gender ini sebagai seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin.¹³ Senada dengan Julia C. Mosse, dalam kamus gender diterangkan bahwa

⁸ Santi Wijaya Hesti Utami, Geins Setyaningrum, dkk, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi*, (Bantul: IP4 Lappera, 2001), h. 3

⁹ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), h. v

¹⁰ *Ibid.*, h. vi

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth.), h. 7

¹² *Ibid.*, h. 8

¹³ Julia C. Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 3

gender merupakan semua atribut mengenai laki-laki, dan perempuan. Misalnya, laki-laki digambarkan memiliki sifat maskulin sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminim. Beate Kraus mendeskripsikan gender sebagai suatu kekuatan yang sangat kuat, dan sistem yang ambigu dalam pengelompokan praktek sosial.¹⁴

Dari beberapa pendapat tersebut, bisa dikatakan bahwa ketika berbicara tentang gender, berarti berbicara tentang peran non-kodrati, baik di wilayah domestik ataupun publik yang dapat dipertukarkan, dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak perlu dibedakan dari jenis kelamin apa si pelaku. Sedangkan *sex* berarti berbicara tentang kodrat manusia dan ini berkaitan dengan jenis kelamin. Misalnya perempuan memiliki rahim dan laki-laki memiliki sperma. Namun, kadang terjadinya kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Selama ini yang terjadi di masyarakat adalah konstruksi sosial dianggap sebagai kodrat dan begitu juga sebaliknya yang seharusnya kodrat justru dianggap konstruksi sosial.¹⁵

Nasaruddin Umar melihat bahwa gender lebih menekankan pada aspek *maskulinitas* atau *feminitas*. Seks lebih menekankan pada perkembangan, dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan.¹⁶ Sedangkan gender merupakan pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir.

Pembedaan yang dikarenakan proses sosial tersebut kemudian menimbulkan persoalan antara peran kedua jenis kelamin karena perempuan selalu dianggap lebih rendah dari pada laki-laki, baik dari segi fisik maupun kemampuan beraktivitas dalam masyarakat. Menurut Bronowski, sebenarnya perbedaan laki-laki dan perempuan itu tidak banyak, tidak seperti pada hewan: jantan dan betina. Jika manusia masih mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan berarti kita kembali pada kehidupan zaman Australopithecus dan pembuat alat-alat purbakala. Manusia mempunyai keistimewaan, anugrah dari Tuhan, yaitu akal yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Sebagai bukti, Bronowski memberikan contoh dengan pemilihan pasangannya: perempuan yang berakal pasti akan mencari pasangannya

¹⁴ Steve Dixon, *Metal Gender*, diakses melalui laman www.ctheory.net pada 28 Agustus 2015

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, h. 10

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35-36.

laki-laki yang berakal pula.¹⁷ Yang masih mempertahankan adanya perbedaan adalah budaya dari masyarakat tertentu sehubungan dengan adat istiadat yang berlaku.

C. Gender dan Struktur Sosial

Pada dasarnya, struksur sosial merupakan total dari jaringan hubungan antara individu-individu, dan kelompok-kelompok person. Dimensi struktur sosial ada dua, yaitu hubungan didik, artinya antara pihak kesatu dengan pihak kedua, tetapi diferensial, antara satu pihak dengan beberapa pihak yang berbeda atau sebaliknya. Sedangkan mengenai bentuk dari struktur sosial ini adalah tetap, sedangkan realitas struktur sosial selalu berubah, dan berganti.¹⁸ Apa yang pernah digegerkan oleh Huntington dengan istilah *clash of civilization*, ternyata tidak hanya menyangkut arena demokrasi. Dalam perkembangannya telah meluas pada soal-soal kemanusiaan yang lebih kompleks, seperti perceraian, aborsi, persamaan *gender*, hak-hak kaum gay, dan lesbian, serta prostitusi. Di sinilah terjadi garis pemisah yang makin menebal antara Barat, dan dunia Islam yang intinya pada soal liberalisasi seksual.¹⁹

Ketika wacana gender muncul, dan mulai memarak di Barat disebabkan oleh perubahan-perubahan pola sosial, terutama semenjak terjadinya revolusi industri. Sebuah perjuangan antar kelas (*class struggle*), yakni antara kaum perempuan sebagai sebuah kelompok sosial melawan kelompok sosial yang mengopresinya, yaitu kaum lelaki dengan tujuan untuk mencapai kesejajaran atau mungkin terkadang menggantikan posisi sang opresor; berlandaskan konsensus akan oposisi biner antara lelaki, dan perempuan.

D. Peran Gender dan Status Sosial

Secara abstrak, status berarti kedudukan seseorang dalam suatu pola tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti pergaulannya, prestisenya, hak serta kewajiban-kewajibannya.²⁰ Para ahli sosiologi membagi kedudukan atau status ini dalam tiga bagian, (a) *Ascribed status*, yakni kedudukan

¹⁷ Moon, Glen W and Cline, Bon C., *Story of Our Land and People*, New York: Rinehart and Winston, Inc., 1950, h. 401-404.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI-Press, 1987), h. 181.

¹⁹ Moch Musoffa Ihsan, *Nilai-nilai Islam dan Modernitas*, Jakarta: Kompas, 05 November 2003.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, edisi IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 265

seseorang dalam masyarakat, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran. (b) *Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja dan bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan masing-masing dalam mengejar, serta mencapai tujuan. (c) *Assigned-status*, yaitu status yang diberikan oleh seseorang atau kelompok.²¹

Berkaitan dengan persoalan kemajuan perempuan dan tercapainya kesetaraan antara perempuan, dan laki-laki merupakan persoalan hak azasi manusia, serta merupakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemajuan perempuan, dan kesetaraan gender tidak dapat dilihat hanya sebagai isu perempuan saja. Memajukan perempuan, dan mencapai kesetaraan gender adalah satu-satunya cara untuk membangun masyarakat yang adil, maju, dan berkesinambungan. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah prasyarat untuk mencapai keamanan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup bagi semua rakyat. Peran gender merupakan ide kultural yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya di dalam masyarakat.²²

Salah satu kajian yang paling menonjol untuk melihat peran gender menurut penulis adalah melalui teori *subjectivity* yang menekankan penolakan terhadap konsep Cartesian²³ akan *cogito (human mind)* sebagai sebuah pusat kendali sentral di mana kemudian makna terhasikan. Singkatnya, *subjectivity* mencoba untuk melihat bagaimana manusia terbentuk sebagai subyek, sebuah sudut pandang untuk mengetahui bagaimana identitas terbentuk dengan mengakui peran wacana, pengetahuan, sejarah, dan konstruksi-konstruksi lain oleh si subyek itu sendiri.

Kajian *subjectivity* seringkali dipersandingkan dengan analisa perbedaan yang berkaitan dengan metode dekonstruksi teks Derrida, dan pada akhirnya seringkali dipakai untuk mengangkat kajian gay atau lesbian (*Queer Theory*).²⁴ Mengenai gender dan seksualitas, sebagai sebuah teks, poststrukturalisme menyatakan ada dua istilah ini dibangun oleh teks yang terus mengalami arus persilangan, dan pergeseran antara tanda, dan makna. Gender dalam konteks seperti ini bukan lagi sebuah *being*, melainkan *becoming*.

²¹ *Ibid*, h. 287-288

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, h. 73.

²³ Jalaluddin Rakhmat, *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 41 dan 326.

²⁴ Mengenai hal ini lihat juga Steve Dixon yang dapat diakses melalui laman www.ctheory.net

Berangkat dari kerangka *subjectivity*, beberapa teori feminis Barat mencoba mengembangkan berbagai argument yang mencoba mendekonstruksi wacana tekstual yang selama ini dianggap telah dibangun dengan menempatkan phallus sebagai pusat (*phallogentrism*), terutama dalam bahasa mereka yang memiliki struktur feminin-maskulin. Dari wilayah lain, Gayatri Spivak menentanghkan konsep gender sebagai '*hegemonic historiography*', yang mencoba mengkritik dominasi teks Barat dalam membangun konstruksi wacana sejarah dunia. Dalam kaca mata Spivak²⁵, hegemoni teks Barat ini secara otomatis berpengaruh dalam membangun image dan representasi kaum marjinal, terutama perempuan Dunia Ketiga yang sering kali menjadi obyek orientalisasi. Berlandaskan ini, yang harus dilakukan adalah mengajukan tuntutan akan posisi kaum *subaltern* (mereka yang termarginalkan secara tekstual oleh sejarah, dalam hal ini adalah kaum perempuan) untuk dimasukkan ke dalam teks.

*Post-strukturalisme*²⁶ yang dikenal dengan salah satu argument besarnya, bahwa semua hal yang ada di dunia ini adalah tanda (*signs*), membawa pada sebuah gagasan bahwa gender, yang mencakup konsep femininitas dan maskulinitas, hanyalah serangkaian konstruksi sosial. Pertentangan yang terjadi kemudian bukanlah sekedar berkisar antara perempuan, dan dominasi lelaki, tetapi pada setiap subyek terhadap konstruksi sosial.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dampak pembangunan terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki tidak akan berbeda. Hal ini bisa jadi dikarenakan peran gender dalam proses pembentukan status sosial tidak bisa berdiri sendiri, sebab ketimpangan status sosial bukan sekedar bersumber pada persoalan seks tetapi seluruh nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.²⁷

E. Peran Gender dan Perubahan Sosial

Kinsley Davis memberikan suatu pengertian mengenai perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.²⁸ Sedangkan Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Antariksa, *Kulturalisme vs Strukturalisme*, News Letter Kunci No. 6-7, Mei-Juni 2000.

²⁷ Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, h. 75.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar...*, h. 336.

material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.²⁹

Sebagaimana diketahui, Plato telah mengembangkan pemikiran umum yang membedakan pengetahuan opini yang mengandalkan penampilan realitas (*doxa*) dengan pengetahuan yang mengandalkan kebajikan moral, kedalaman, dan keabadian. Pada perkembangannya, pemisahan kedua pengetahuan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa rasional merupakan kelanjutan penampilan realitas, telah memihak pada perangkat keras atau kekakuan obyek formal pengetahuan yang kemudian memiliki akses bergelombang pada politik, dan kekuasaan yang menghasilkan ketidak-adilan. Gender, sebagai perbedaan perilaku atau *behavioral differences* antara perempuan dan laki-laki ternyata telah menghasilkan peran yang pada akhirnya memunculkan ketidakadilan struktural yang bersifat sistemik yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Oleh karena itu, yang perlu diusahakan adalah bagaimana menciptakan kesetaraan dalam melakukan perubahan sosial.

Dalam beberapa waktu yang lalu, peran perempuan dalam kehidupan sosial dibatasi pada persoalan rumah tangga seperti mengurus anak, mencuci, memasak, dan melayani suami. Sesuai perkembangan jaman, peran ini kemudian mengalami satu pergeseran yang sangat signifikan dengan semakin banyaknya perempuan yang melakukan aktifitas di wilayah publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *Pertama*, banyaknya jenis pekerjaan yang membutuhkan peran dan kemampuan tipikal perempuan. *Kedua*, peluang yang semakin besar bagi perempuan untuk beraktifitas di luar rumah akibat teknologi dalam pekerjaan domestik, *Ketiga*, perempuan mendapatkan *human capital investment* lebih baik, dan *Keempat*, motif ekonomi untuk mendapat penghasilan tambahan bagi keluarga.³⁰

F. Gender dalam Normativitas dan Historisitas

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan etis Al-Qur'an tentang peran gender, maka yang harus dilakukan adalah dengan membiarkan Al-Qur'an menafsirkan dan membicarakan hal tersebut dengan menggunakan perspektif sendiri. Dengan cara ini, maka bisa ditarik garis demarkasi yang tegas antara batas perspektif Al-Qur'an dengan batas bias budaya yang melindunginya.

²⁹ *Ibid*, h. 337.

³⁰ Tim IP4-LAPPERA, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi (Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan)*, (Yogyakarta: IP4 Lappera Indonesia, 2001), h. 134-135.

Peran kaum perempuan yang dibicarakan dalam Al-Qur'an masuk ke dalam salah satu dari tiga kategori yang diklasifikasikan oleh Amina Wadud Muchsin yaitu *pertama*, peran yang menggambarkan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana si perempuan tinggal, tanpa pujian atau kritik sekalipun dari Al-Qur'an. *Kedua*, peran yang memainkan fungsi keperempuanan yang secara universal diterima (yaitu mengasuh atau merawat), dengan beberapa pengecualian atau bahkan telah diberikan dalam Al-Qur'an sendiri. *Ketiga*, peran yang memainkan fungsi spesifik non-gender, yakni peran yang menggambarkan usaha manusia di muka bumi, dan disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan fungsi spesifik ini, bukan untuk menunjukkan jenis kelamin pelakunya yang kebetulan seorang perempuan.³¹

Pada awalnya, wanita di dunia Arab tidak mendapat warisan hal ini secara kemanusiaan sangat menindas karena telah menghilangkan hak dari pada manusia itu sendiri. Namun, hal ini kemudian hilang setelah Islam datang membawa ajaran yang memberikan hak yang sama antara wanita dan laki-laki dalam persoalan pembagian warisan.³² Pada dasarnya, menurut Nasarudddin Umar, persoalan ketimpangan gender yang terjadi dalam dunia Arab pra-Islam berawal dari tradisi mitos yang bersifat misoginis. Mitos ini muncul dari proses *encounters* antara dunia Arab dengan peradaban dunia luar (seperti Mesir Kuno, Yunani Kuno, Yahudi-Kristen, dan Sasania Zoroater).³³ Dari sinilah kemudian terbentuk sebuah kebudayaan Arab pra-Islam yang bersifat patriarki.

Lebih jauh Umar menyatakan bahwa sekitar tahun 1800 SM. Hammurabi membuat sebuah kitab yang dikenal dengan istilah Kode Hammurabi yang sangat mendeskreditkan posisi wanita. Kitab inilah kemudian banyak berpengaruh pada kitab-kitab tafsir dengan mengambil bentuk kisah-kisah israiliyat.³⁴ Tradisi Arab pra-Islam yang dipengaruhi oleh tradisi mitos ini kemudian mengakar pada kehidupan masyarakat yang menghasilkan tradisi: *Pertama*, mengubur anak perempuan karena dianggap beban keluarga. Tradisi ini kemudian oleh Islam dilarang dengan turunnya surat Al-An'am ayat 151, *Kedua*, laki-laki diperbolehkan untuk menikah tanpa pembatasan jumlah, *Ketiga*, masyarakat Arab pra-Islam dibangun atas dasar ikatan

³¹ Amina Wadud Muchsin, *Qu'ran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. 45.

³² Wahab az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), h. 251.

³³ Nasaruddin Umar dkk., *Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)*, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 107-108.

³⁴ *Ibid*, h. 109.

keluarga, keturunan kerabat, dan ikatan etnis yang kemudian tradisi ini lebih dikenal dengan istilah patriarkal, *Keempat*, suami bebas menceraikan istrinya tanpa batas maksimal, sementara istri tidak memiliki hak cerai. Hal ini ditentang oleh Islam dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 229, *Kelima*, wanita merupakan hak kekayaan yang bisa diwariskan dan hal ini ditentang oleh Islam dengan turunnya surat An-Nisa' ayat 19.³⁵

G. Gender dalam Bidang Sosial

Perbedaan peran antara laki-laki, dan perempuan di masyarakat dibahas dalam berbagai teori yang secara umum dapat dikategorikan kepada dua teori besar, yaitu *pertama*, teori nature, yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki, dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini, sederet perbedaan biologis antara laki-laki, dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. *Kedua*, teori nurture mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki, dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.³⁶

Persoalan yang mendasar dalam Islam ketika berbicara tentang *gender* adalah posisi perempuan secara normatif. Mansour Fakih dalam melihat ini mengelompokanya dalam dua golongan besar, yaitu *pertama* relasi antara perempuan, dan laki-laki yang terjadi sampai saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam. *Kedua*, kelompok yang menganggap bahwa perempuan saat ini dalam suatu sistem yang diskriminatif.³⁷ Berkaitan dengan ini, penafsiran agama memegang peranan penting dalam memecahkan dualism pandangan ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa posisi perempuan, dan laki-laki sama sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

Ayat tersebut, jelas bahwa tidak ada yang membedakan hubungan antara perempuan dan laki-laki kecuali tingkat ketaqwaan seseorang. Dari sini, bisa dilihat dengan jelas bahwa antara keduanya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, dan berlomba-lomba melakukan kebajikan, mengabdikan kepada masyarakat, agama, dan negara. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97 yang artinya barang

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzaafa, 2002), h. 37-41.

³⁶ Nasaruddin Umar, "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender....", h. 45-68

³⁷ Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 37

siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁸

Hal yang harus dipahami adalah bahwa keadilan memiliki konteks sosial, sehingga keadilan pun akan selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Begitu pula keadilan dalam konteks kesetaraan gender, Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa; “*Dan para wanita mempunyai hak-hak (terhadap laki-laki) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.*” (QS. Al-Baqarah: 228).³⁹ Namun begitu, yang menjadi pokok permasalahan dalam memahami posisi perempuan dan laki-laki dalam Islam adalah kata *qawwam* dalam surat an-Nisa’ ayat 34 yang artinya “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian dari mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan sebahagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita yang saleh ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara (mereka)*” (QS. Al-Nisa’:34).⁴⁰

Semestinya ayat tersebut perlu dipahami secara *kontekstual-historikal* (pemahaman yang disesuaikan dengan konteks sejarah), bukan dengan pendekatan *literal-normatif* (pemahaman berdasarkan teks yang menekankan sisi normatifnya). Hal ini perlu dilakukan sebab, menurut Asghar Ali, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki, dan perempuan.⁴¹

Kesadaran akan kesetaraan, kedudukan, dan peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik keduanya, yang pada tahap selanjutnya akan menciptakan prinsip keadilan, yang menurut Mansour Fakih merupakan inti dari ajaran setiap agama.⁴² Al-Qur’an mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, dan kultural termasuk keadilan gender. Dengan demikian, diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil yang membutuhkan analisis sosial. Yang

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 417

³⁹ *Ibid.*, h. 55

⁴⁰ *Ibid.*, h. 123.

⁴¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 81.

⁴² Mansour Fakih, *Membincang Feminisme...*, h. 129.

dimaksud dengan pemimpin dalam surat An-Nisa' tersebut adalah laki-laki yang memiliki keutamaan. Sesuai dengan *asbab Al-nuzul*, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Muhammad Asad menafsirkan kata *qawwam* dengan menekankan pada kewajiban laki-laki untuk menjaga perempuan dengan menerjemahkannya menjaga perempuan secara penuh. Oleh karena itu, menjadi *qawwam* berarti memberikan tambahan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Selain kata *qawwam*, kata yang sering mengundang perdebatan adalah kata *Ar-Rijal*, dan *an-Nisa'*. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, misalnya kata *Ar-Rijal* dalam tafsir *Al-Jalalain* sebagai laki-laki yang akil baligh, dan merdeka. Jadi semua yang masuk dalam katagori ini termasuk juga kategori *Az-Zakar*. Tetapi, tidak semua *Az-Zakar* masuk dalam ketagori *Ar-Rijal Ar-Rajul* menuntut kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama yang berkaitan dengan maskulinitas.

Bias laki-laki terjadi hampir setiap teori berbagai ilmu, adalah dilematis bila paradigma, konsep, teori, cara mengkaji kenyataan, dan kesediaan untuk menerima bukti-bukti empiris dari bidang keilmuan yang sudah berkembang dibentuk hanya oleh satu dimensi jenis kelamin saja, yaitu lelaki.⁴³ Irwan Abdullah menawarkan satu pendekatan yang lebih universal dalam melihat persoalan ketidak-adilan ini, yakni dengan memakai pendekatan gender (bukan seks), sehingga fokus kajian tidak hanya tertuju pada perempuan saja tetapi juga pada laki-laki. Dengan tawaran seperti ini, Abdullah mencoba tetap berpegang pada realitas, bahwa diantara keduanya (perempuan dan laki-laki) memiliki relasi yang tidak bisa diganti dengan realitas lain.⁴⁴ Secara garis besar, Irwan Abdullah menawarkan dua pemahaman mengenai ketidakadilan yang timbul karena adanya perbedaan gender ini yang meliputi sosial dan ekonomi.

H. Simpulan

Persoalan utama yang dihadapi oleh perempuan adalah peran ganda yang harus diterima. Dalam hal ini Ivan Illich, melihat bahwa pada dasarnya ketimpangan ini terjadi bukan mutlak kesalahan struktur patriarkal, tetapi kesalahan para kaum feminis dalam mengembangkan wacana. Kaum feminis telah merubah dirinya

⁴³ Hesti R.Wijaya, *Penelitian Berperspektif Gender*, Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4/November 1996, h. 21

⁴⁴ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang, 2001), h. 23

menjadi laki-laki. Mereka secara intensif mengembangkan wacana bahwa perempuan adalah lemah, sehingga mereka kehilangan dimensi lain dalam menjelaskan realitas kehidupan perempuan.⁴⁵

Dimensi lain dalam melihat persoalan ini adalah struktur hegemonik yang lahir dari struktur kepentingan. Dari pembentukan hegemoni terjadi interaksi, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi tertentu. Di sinilah perempuan dikalahkan dalam struktur hegemonik tersebut. Maka, pertanyaannya, apakah benar perempuan kalah, atau memang mengalah? Kecenderungan yang dapat diamati, bahwa perspektif perempuan sendiri tidak digunakan dalam menjelaskan apa maunya perempuan, sehingga tidak mengetahui secara mendalam keinginan-keinginan perempuan.⁴⁶ Para politisi, peneliti, dan kaum feminis selalu mereproduksi struktur patriarkal dengan menekankan pada ketimpangan gender, perempuan sebagai makhluk yang lemah, penuh dengan sikap ketergantungan, dan sebagainya.

Reproduksi wacana gender seperti penjelasan di atas, sebaiknya segera diakhiri. Artinya kita tidak melakukan apa-apa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan, tapi justru semakin mensubordinasikan perempuan. Diperparah lagi oleh arus kapitalisme. Kapitalisme dengan cerdiknyanya telah memanfaatkan laki-laki untuk melestarikan struktur ketimpangan gender. Contoh sederhana, kepentingan kapitalis atas perempuan melalui media iklan. Melalui media ini, perempuan telah ditransformasikan ke dalam nilai tentang gaya dan cara berpakaian. Implikasi lebih luas akan muncul berkaitan dengan kecenderungan iklan memotret aspek tertentu dari perempuan.⁴⁷

Yang sebenarnya, hubungan perempuan, dan laki-laki terbentuk secara historis oleh berbagai proses sosial, yang kemudian menjadi suatu susunan kekuasaan tempat perempuan berada pada posisi yang ter subordinasi di dalam kehidupan seksual. Dari sini kemudian tercipta nilai standar yang menguntungkan laki-laki yang merupakan

⁴⁵ Baca: Vandana Shiva, *Bebas Dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. 20.

⁴⁶ Irwan Abdullah, "Tantangan Perempuan dalam Era Global" dalam *Makalah* yang diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun ke-25 Pusat Penelitian Kependudukan UGM, di Hotel Century Yogyakarta, 20 April 2012.

⁴⁷ Baca: Irwan Abdullah dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 32.

realitas objektif yang menuntut kepatuhan kepatuhan, sehingga menjadi praktik yang terus menerus berulang di dalam kehidupan sosial.⁴⁸

Abdullah menawarkan tiga pilar penyadaran gender yang meliputi: *Pertama*, penyadaran gender merupakan proses yang melibatkan unit-unit yang beragam dengan sifatnya masing-masing sehingga harus difahami masing-masing unit, sehingga dapat dirumuskan langka strategis, dan pada tingkatan praktis unit tersebut harus terlibat, *Kedua*, penyadaran *gender* harus mempertimbangkan bentuk relasi yang tidak hanya merupakan konstruksi yang mapan, dan *Ketiga*, penyadaran *gender* yang terkait dengan reproduksi perempuan harus dilihat dalam tataran ideologis yang telah menjadi kosmologi suatu masyarakat.⁴⁹

Demikian pula, kebutuhan ekonomi ternyata telah memberikan kontribusi dalam membentuk ketimpangan gender. Peran perempuan dalam rumah tangga semakin penting sejalan dengan semakin menurunnya tingkat produktifitas lahan pertanian yang menuntut keterlibatan perempuan dalam bidang perekonomian.⁵⁰ Untuk mengantisipasi terjadinya peran ganda, maka seharusnya paling tidak dilakukan tiga hal, yakni:

Pertama, keterlibatan perempuan dalam bidang publik menempati peran ganda yang memang berarti beban ganda, sehingga diperlukan dekonstruksi sosial yang kemudian membutuhkan kesadaran dalam rekonstruksi realitas obyektif yang baru. *Kedua*, perbedaan domestik-publik sesungguhnya menyangkut kepentingan yang berbeda, sehingga pergeseran antar keduanya harus dilakukan dalam persoalan-persoalan substanti. *Ketiga*, dalam situasi ekonomi yang semakin kompetitif, perempuan tidak lebih merupakan instrumen kapitalis. Keterlibatan perempuan di sini, tidak memiliki arti mendasar bagi peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga perubahan keterlibatan perempuan harus dinilai secara seksama.⁵¹ Peningkatan keterlibatan perempuan dalam wilayah ekonomi akan sangat berhubungan (langsung maupun tidak langsung) dengan internalisasi, dan globalisasi ekonomi.⁵²

⁴⁸ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan...*, h. 46

⁴⁹ Irwan Abdullah, *Kesadaran Gender dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, dalam *Makalah diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 19-24 Juli 1999*.

⁵⁰ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan...*, h. 145-146.

⁵¹ *Ibid*, h. 197-199.

⁵² Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*, Prisma No. 6 tahun 1995.

Dalam iklim yang semakin kompetitif, tenaga kerja perempuan dibutuhkan untuk mendukung suatu bentuk kegiatan ekonomi yang kapitalistik. Partisipasi ekonomi perempuan terkait sangat terkat dengan perubahan struktur ekonomi yang telah membuka peluang baru bagi perempuan dalam berbagai pekerjaan.⁵³ Meskipun partisipasi ekonomi perempuan sudah mulai terbuka yang menjadi persoalan kemudian adalah harga tenaga perempuan masih tetap di bawah harga laki-laki, dan ini berarti telah menciptakan ketidakadilan gender dalam bidang ekonomi [.]

REFERENSI

- Amina Wadud Muchsin, *Qu'ran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi, 2001).
- Andriana Venny, *Perempuan, dan Tubuhnya* diakses melalui laman <http://www.yjp.or.id/yjp-upload> dikutip pada tanggal 20 Agustus 2015.
- Antariksa, *Kulturalisme vs Strukturalisme*, News Letter Kunci No. 6-7, Mei-Juni 2000.
- Deny Hamdani, "Islam, dan Wacana Gender", dalam *Jurnal Justisia*, Edisi 18, Juli 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1986).
- Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).
- Hesti R. Wijaya, *Penelitian Berperspektif Gender*, Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4/ November 1996.
- Irwan Abdullah dalam Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997).
- _____, "Tantangan Perempuan dalam Era Global" dalam Makalah yang diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun ke-25 Pusat Penelitian Kependudukan UGM, di Hotel Century Yogyakarta, 20 April 2012.
- _____, *Kesadaran Gender, dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*, dalam Makalah diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 19-24 Juli 1999.
- _____, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*, Prisma No. 6 tahun 1995.

⁵³ Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan...*, h. 19

- _____, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001).
- Julia C. Mosse, *Gender, dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002).
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI-Press, 1987).
- Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Mansour Fakih, *Analisis Gender, dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth).
- Mansour Fakih, dalam “Pengantar” Julian Cleves Mosse, *Gender, dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Moch Musoffa Ihsan, *Nilai-nilai Islam, dan Modernitas*, (Jakarta: Kompas, 05 November 2003).
- Moon, Glen W and Cline, Bon C., *Story of Our Land and People*, (New York: Rinehart and Winston, Inc., 1950).
- Nasaruddin Umar dkk., Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)”, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Santi Wijaya Hesti Utami, Geins Setyaningrum, dkk, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi*, (Bantul: IP4 Lappera, 2001).
- Siti Aminah, “Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur’an Pendekatan dengan Metode Tematik”, dalam *Jurnal Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Walisongo*, Semarang, Edisi 17, Semarang, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, edisi IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).
- Steve Dixon, *Metal Gender*, dalam www.ctheory.net dikutip pada tanggal 28 Agustus 2015.
- Tim IP4-LAPPERA, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi (Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan)*, (Yogyakarta: IP4 Lappera Indonesia, 2001).

Vandana Shiva, *Bebas Dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

Wahab az-Zuhaili, *Al-Qur'an, dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996).

Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik, dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).